



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

6.1 KESIMPULAN

Penerapan *electronic government* pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota pekanbaru mengacu pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tujuan dari penggunaan *electronic government* adalah agar proses pelayanan lebih efektif dan efisien sehingga terwujudnya *good governance*.

Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan didapatkan dari hasil observasi, wawancara, serta data sekunder maupun primer dengan masing-masing sub indikator yang penulis teliti, dapat disimpulkan bahwa penerapan *electronic government* dalam upaya peningkatan pelayanan publik pada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota pekanbaru bahwa elemen elemen suksesnya belum mampu meningkatkan pelayanan publik. Hal ini dikarenakan dalam penerapannya masih terdapat hambatan seperti:

1. Dari segi Support, belum sepenuhnya terpenuhi dikarena masih ada peraturan yang kurang sehingga dalam pelaksanaannya belum maksimal. Disamping itu, dalam penerapan *electronic government*, Pemerintah kota pekanbaru belum melandasi dengan peraturan baik dalam bentuk peraturan dinas atau Peraturan walikota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dari segi capacity sudah cukup memadai, tetapi perlu ditingkatkan lagi. Seperti dari bentuk e-government yang berupa website dari dinas kependudukan belum bisa memberikan akses pelayanan dalam bentuk layanan pendaftaran secara online. E-government disini baru mampu menyediakan akses pelayanan informasi mengenai berbagai pelayanan kepada masyarakat. Masih kurang fitur seperti yang disebutkan pada poin nomor satu yaitu layanan pendaftaran secara online. Menurut penulis seharusnya pihak pengelola atau pemberi layanan memasukkan fitur tersebut agar yang mengenal teknologi bisa mendaftar secara online dan ketika sampai di kantor masyarakat hanya tinggal mengantar persyaratannya saja.
3. Dari segi value, Informasi-informasi yang ditampilkan pada website juga masih kurang dalam hal menampilkan informasi terbaru, baik dari data-data maupun kegiatan-kegiatan terbaru lainnya. Seharusnya pihak pengelola melakukan pembaharuan informasi data mau kegiatan agar masyarakat yang mengakses website tersebut dapat melihat informasi terbaru.

Dari masyarakat juga terlibat yaitu disebabkan dari kurangnya antusias dari masyarakat untuk memanfaatkan media teknologi untuk mengakses situs-situs resmi pemerintah kota, apalagi untuk masyarakat yang telah berumur dan kurang melek akan teknologi. Mereka lebih suka menggunakan cara pelayanan yang lama yaitu datang langsung ketempat karena langsung berhadapan dengan petugas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6.2 SARAN

Electronic government jika dimanfaatkan secara optimal tentunya berdampak positif dan memberikan manfaat yang besar bagi aparat pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran terkait penerapan E-government untuk pihak-pihak pemberi pelayanan publik dan untuk penelitian selanjutnya. Bagi peneliti selanjutnya penulis menyarankan agar peneliti dapat memfokuskan penelitian pada upaya-upaya yang perlu dilakukan agar penggunaan website Dinas kependudukan dalam proses kegiatan pencatatan sipil di dinas tersebut dapat maksimal. Dari segi pihak pemberi pelayanan publik yaitu dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota pekanbaru penulis memberi saran yaitu sebagai berikut

1. Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota pekanbaru perlu melakukan pembentukan budaya organisasi yang mendukung terwujudnya komitmen yang tinggi dari aparatnya dalam pelaksanaan pelayanan public serta hendaknya Pemerintah kota pekanbaru segera mengeluarkan aturan-aturan mengenai penerapan *e-government* agar dalam pelaksanaannya tidak mengalami hambatan.
2. Kualitas Sumber daya manusia memang yang paling mendasar selain sarana dan prasarana yang perlu terus ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitas sesuai dengan kebutuhan daerah. Perlu dilakukan pula suatu pelatihan baik itu pelatihan yang ditujukan bagi karyawan maupun masyarakat

dikarenakan tingkat pengetahuan masyarakat yang masih rendah. Karena Peran serta masyarakat perlu terus ditingkatkan

3. Website yang ada saat ini hendaknya lebih dioptimalkan kembali terutama yang ada pada OPD khususnya yang berkaitan dengan informasi-informasi dan pelayanan yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat.
4. Sosialisasi e-government perlu dilakukan secara konsisten, kontinyu dan insentif kepada masyarakat dikarenakan masyarakat belum mengerti apa dan bagaimana aplikasi e-government serta manfaat yang dapat mereka ambil. Strategi pemasaran bagi web pemerintah sangat diperlukan untuk kelangsungan e-government.
5. Penerapan e-government perlu pengawasan secara terus menerus karena bisa jadi sistem manajemennya akan berubah menjadi tradisional lagi jika tidak diawasi secara langsung. Evaluasi secara terus menerus juga diperlukan sehingga dapat diketahui bagian manakah yang tidak berjalan secara optimal.
6. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai kebijakan penerapan e-government karena hal ini menyangkut kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.